



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Gatot Subroto No. 8 Rembang ☎ (0295) 6980426 Fax. (0295) 6980425
Website: dinkominfo.rembangkab.go.id email: dinkominfo@rembangkab.go.id

REMBANG – KODE POS 59211

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Surat yang menurut sifatnya perlu Rahasia	<ul style="list-style-type: none">➢ UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3;➢ Pasal 17 UU NG 14 Th 2008 Huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas
2.	Memorandum / surat-surat antar dan inter badan publik	<ul style="list-style-type: none">➢ UU No.43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3;➢ Pasal 17 UU NG 14 Th 2008 Huruf i dan j	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan
3.	Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none">➢ UU no 43 tahun 2009 tentang kearsipan;➢ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyesuaian kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengelola surat
4.	Dokumen dan informasi perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	<ul style="list-style-type: none">➢ UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal	<ol style="list-style-type: none">1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan2. Menjaga informasi	Sampai selesai sengketa

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		17 Huruf a dan j	UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap	
5.	Dokumen proses penyelesaian sengketa / konflik lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf a dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat penyelesaian sengketa dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyelesaian sengketa tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 	Sampai selesai sengketa
6.	Informasi data pribadi penegak perda (PPNS)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
7.	Rencana operasi penegakan Perda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a 	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar penegakan hukum	Sampai dilaksanakan kegiatan
8.	<p>Dokumen Hasil Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rapat Pimpinan DPRD ➤ Rapat Konsultasi ➤ Rapat Badan Musyawarah ➤ Rapat Badan Anggaran ➤ Rapat Badan Kehormatan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraturan DPRD No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pasal 71 ayat (2) & (3), pasal 72 dan 73 ayat (1), (2), (3), dan (4) 	Dapat menghambat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan (pasal 73 ayat (1)) 2. Materi yang diperoleh dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat (pasal 73 ayat (2)) 3. Setiap orang melihat, mendengar, atau mengetahui 	Sebelum diputuskan dalam sidang paripurna

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
				<p>pembicara an atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagai mana dimaksud ayat (2), wajib merahasiakannya</p> <p>4. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (13) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
	200 POLITIK				
9.	Data kegiatan intelejen terkait dengan ideologi ,politik ,sosial budaya 1.27 cmdan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan J 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah 2.Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3.Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan / atau daerah / wilayah 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
10.	Data exs tapol G30S/PKI	Intruksi Mendagri No.32/1981	Memecuh konflik antar	Menghindari konflik	Sampai terbitnya regu

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
			masyarakat	antar masyarakat	lasi baru
	300 KEAMANAN DAN KETERTIB AN UMUM				
	400 KESEJAHTERAAN RAKYAT				
11.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 48 dan pasal 51 huruf c ➢ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf h dan j ➢ Permenkes No 1419/ MEN KES/ PER/ X/ 2005 Pasal 18 ayat (1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkap rahasia pribadi dan 2. Dapt mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi data pribadi dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 	Tidak terbatas
12.	Catatan Rekam Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 (ayat (2) ➢ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/ Menkes/ III/ 2008 tahun 2008 tentang Rekam Medis pasal 10 ayat (1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rasia pribadi seseorang 2. Bisa mengganggu proses penyembuhan penderita 	Melindungi rahasia pribadi seseorang.	Sampai dengan ada peraturan lain.
13.	Informasi Hasil Pemeriksaan diagnosis HIV	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No. 14 h 2008 tentang KIP pasal huruf h dan i ➢ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS pasal 21 ayat 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rasia pribadi seseorang 2. Bisa menimbulkan keresahan masyarakat (takut tertular meskipun tidak meski terjadi). 3. Dapat mengganggu kondisi kejiwaan penderita. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan keluarga 2. Bisa membantu penyembuhan pasien. 	Sampai dengan ada peraturan lain.
14.	Data pribadi Kekerasan terhadap perempuan dan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang 	Tidak Terbatas

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	anak	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak ➤ UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap	dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat	
15.	Data PMKS by name by address	UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan d 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat	Tidak Terbatas
16.	Data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) by name by address	➤ UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	1. Dapat menghambat penyelesaian sengketa 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasia kan/atau tidak boleh diungkap	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan terhambat	Tidak Terbatas
	500 PEREKONOMIAN				
17.	Berita sandi	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama berita masih bersifat rahasia
18.	Kunci sistem sandi	➤ UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkpan nya membahayakan keamanan negara
19.	Penempatan jaringan, per alatan sandi dan tempat kegiatan sandi	➤ UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan per tahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapan nya membahayakan keamanan negara

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
20.	Berita/radiogram rahasia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
21.	Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 huruf b,i dan j 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
22.	Internet protocol/IP address private	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➤ UU NO 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b ,i dan j 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
23.	Bandwidth management	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➤ UU NO 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b ,i dan j 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
24.	Sistem keamanan informasi.27 cm	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 ➤ UU NO 17 Th 2008 Pasal 17 huruf b ,i dan j 	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum/ merugikan keuangan negara	Terjadi dari potensi kerugian	Selama masih digunakan/ berlaku
25.	Dokumen pengadaan barang/ jasa pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf i dan j 	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang / jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai/ diketahui pemenangnya
26.	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di	Memperlancar proses penyusunan kebijakan	Sampai diketahui pemenangnya

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		<p>dan j</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 	bidang pengadaan barang/jasa	di bidang pengadaan barang/jasa	
27.	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j ➢ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran kontrak selesai
28.	Susunan kepanitiaan pengadaan barang barang /jasa melalui LPSE	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf b, i dan j ➢ Perpres RI No 54 Th 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah 	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen	Selama proses pengadaan barang/jasa
600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGA KERJAAN					
700 PENGAWASAN					
29.	Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan, LHP Reguler, hasil Monitoring, hasil Evaluasi	UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf I dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepen tinagan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepen tinagan	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum
800 KEPEGAWAIAN					
30.	Soal-soal ujian kedinasan	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat (3) ➢ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf I dan j 	Mengganggu akuntabilitas pelak sanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran	Tidak terbatas

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
31.	Data hasil Check up kesehatan perorangan PNS/pejabat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hokum
32.	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/ pejabat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada izin yang bersangkutan
33.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan Huruf h	Menggangu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan
34.	Data rencana penempatan PNS / CPNS	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan Huruf I	Menggangu kebijakn pemerintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan
35.	Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan Huruf I	Menggangu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindak lanjuti
36.	Dokumen pertimbangan/rekomenda si Baperjakat	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 14 tahun 2008 tentang KIP ,pasal 17 huruf I dan j ➢ PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan structural, pasal 14 	Menggangu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti
37.	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	<ul style="list-style-type: none"> ➢ UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h, i ,dan j ➢ PP No 10 tahun 1983 jo.PP No 45 tahun 1990 	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektifitas putusan izin	Sampai keluarnya keputusan izin
38.	Biodata elektronik dan	➢ UU No 11 Th 2008 tentang	Data yang bersifat pribadi	Untuk menjaga	Selama masih bersang

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	non elektronik PNS lengkap	ITE ➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP,Pasal 17 huruf h, I & j	bila dibuka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	kerahasiaan PNS yang bersangkutan	kutan jadi PNS
39.	Arsip data perseorangan PNS	UU no 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 hufuf h,I, & j	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan privasi sese orang	Selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS atau diijinkan yang bersangkutan
40.	Daftar usulan pengangkatan dalam jabatan struktural	➤ UU NO 14 Th 2008 Pasal 17 Huruf I dan j ➤ PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan	Setelah usulan direalisasikan
41.	Daftar pejabat yang akan dilantik	➤ Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j ➤ PP No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, BAB III Keputusan kepala BKN No 13 Th 2002 tentang naan PP No 100 Tahun 2002 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural, sebagai mana diubah dengan PP No 13 Th 200,Lampiran I Angka romawi II huruf B No 5	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunaya SK/pelantikan
	900 KEUANGAN				
42.	Dokumen laporan/surat bertanggungjawaban keuangan/SPJ berikut lampir	➤ UU No 43 Th 2009 tentang kearsipan, pasal 44 ayat (1) dan (2)	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diferivikasi oleh aparat pemeriksa / penga

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
	annya	➤ UU No 14 Th 2008 tentang KIP ,Pasal 17 huruf i, dan j			wasan / auditor (DPKP /BPK)
43.	Data wajib pajak dan retribusi	➤ UU no 14 Th 2008 Pasl 17 huruf i dan j	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa	Menjaga privasi wajib pajak / retribusi	Atas izin yang bersangkutan
44.	Kode akses sistem elektronik	UU No.11/2008 Tentang ITE Pasal 1 angka 6	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan